

## Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat

Muhammad Nasri Katman<sup>1</sup>, Firawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [Muh.nasri@Uin-Alauddin.ac.id](mailto:Muh.nasri@Uin-Alauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [90100119139@uin-Alauddin.ac.id](mailto:90100119139@uin-Alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, hambatan yang dihadapi dan bagaimana peran LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif terhadap pelaku Ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai dengan pendekatan kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang BNI Syariah Jeneponto, BRI Jeneponto, dan pengusaha mikro. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa sudah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi pelaku Ekonomi masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa produk, program, pembiayaan yang ditujukan buat para pelaku ekonomi masyarakat. Hambatan yang dihadapi, SDM dan kantor layanan terbatas, terkendala agunan sebagai second way out dikarenakan pembiayaan harus tetap aman, pelayanan internal belum optimal, pemahaman dan kesadaran masyarakat masih senang dengan pinjaman instant, tidak mau ribet sehingga masyarakat lebih banyak yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional ketimbang LKS yang diasumsikan prosesnya terkesan ribet. Pelaku usaha mikro memerlukan peran LKS terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional, LKS dengan institusi ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konsumtif dan bisa menutupi kebutuhan dasar investasi ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci** : *Keuangan Inklusif, Keuangan Syariah, LKS.*

**ABSTRACT** - This study aims to determine what efforts have been done by LKS in implementing inclusive finance, obstacles faced and how the role of LKS in implementing inclusive finance to the perpetrators of Community economy. This research was conducted by using survey method with qualitative approach. Key informants in this research are BNI Syariah

Jeneponto Head, BRI Jeneponto, and micro entrepreneurs. The next result shows that there are quite a lot of efforts done by LKS in implementing inclusive finance for the perpetrators of Community economy, this is evidenced by the existence of some products, programs, financing aimed at the perpetrators of Community economy. Constraints faced, human resources and limited service offices, constrained collateral as a second way out because financing must remain safe, internal service is not optimal, understanding and awareness of people are still happy with instant loans, do not want complicated so that more people who transact with financial institutions conventional than LKS which assumed the process seemed complicated. Micro business actors need the role of LKS especially in the case of capital used to expand the market and expand their business so as to contribute greatly in the national economy, LKS with ZISWAF institution is able to provide a way out to fulfill basic needs of society that is consumptive and can cover the basic needs of MSME investment .

**Keywords:** *Inclusive Finance, Sharia Finance, LKS.*

## **PENDAHULUAN**

Xiaoqiang Cheng dan Hans Degryse (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan, baik perbankan maupun nonbank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pelayanan perbankan seperti pemberian kredit bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi<sup>1</sup>.

Berbanding terbalik dengan pernyataan di atas, pertumbuhan ekonomi Asia belum didukung oleh akses masyarakat terhadap lembaga keuangan. Akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan juga masih rendah. Berdasarkan data yang diperoleh oleh pihak Perbankan, Global Financial pada tahun 2011 yang dipaparkan tentang Financial Inclusion Index di Indonesia sekitar 19.6 %. Ini masih jauh di bawah negara-negara lain seperti Malaysia 66.7 persen, Philipina 26.5 persen, Thailand 77.7 persen, Vietnam

---

<sup>1</sup> N Nengsih, 'Peran Perbankang Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia, Etikonomi', 14, No. 2 (2015).

21.4 persen, India 35.2 persen, China 63.8 persen, Rusia 48.2 persen, dan Brazil 55.9 persen<sup>2</sup>.

Rendahnya akses layanan finansial ini selain disebabkan karena terbatasnya tingkat penetrasi perbankan, dan juga karena terbatasnya edukasi, terbatasnya akses terhadap transaksi pembayaran, terbatasnya akses tabungan, terbatasnya akses kredit, dan terbatasnya akses ke pelayanan asuransi, penyebabnya yaitu dari warga yang miskin serta tidak mempunyai tanggungan cukup, seperti yang telah ditetapkan dari pihak bank untuk memperoleh suatu pengkreditan dan kurangnya minat pemilik lembaga keuangan untuk menggarap bisnis di sektor ini.

Selanjutnya yang dimaksud MEA adalah sebuah kesepakatan di antara negaranegara ASEAN dalam rangka penguatan di berbagai sektor, terutama sebagai bentuk pertahanan dari suatu guncangan global tersebut. Implementasi kebijakan ini mirip dengan Free Trade Area (FTA) yang yang dilaksanakan pada tahun 2020 nanti, namun dalam cakupan yang lebih kecil yaitu ASEAN. Kebijakan ini telah direncanakan jauh hari sebelumnya, namun karena kebutuhan yang mendesak khususnya dalam hal perhimpunan antar Negara.

Berdasarkan dari hasil laporan dari Islamic Financial Services Board 2013, dapat dilihat dari rasio profitabilitasnya, industri perbankan syariah Indonesia lebih kompetitif ketika dibandingkan dengan Malaysia. Hal itu terlihat dari nilai return on equity dan return on asset perbankan syariah Indonesia yang mengalahkan Malaysia. Sementara dilihat dari besaran market share perbankan syariah di level ASEAN, GIFR menempatkan Indonesia (5%) pada peringkat kedua setelah Malaysia (18%). Modal itu cukup membuat lebih optimis menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Asia Tenggara, ada beberapa negara yang menjadi pemain besar di industri

---

<sup>2</sup> Nengsih.



Type equation here.keuangan syariah terutama perbankan syariah yakni Indonesia dan Malaysia. Malaysia lebih dahulu mendirikan bank syariah, mulai tahun 1983 dan secara pangsa pasar lebih besar, dengan target 25% pada tahun 2014 (The Star).

Keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang dapat ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk serta jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan sebuah lembaga telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 11 Desember 2012. Kelahiran lembaga keuangan mikro dilatarbelakangi dari dominasi lembaga-lembaga keuangan makro yang dapat menguasai roda perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan makro memiliki modal yang besar dan juga dapat digerakkan dengan sistem yang rumit, sehingga masyarakat menengah ke bawah sulit untuk mengakses suatu dana dari lembaga keuangan makro.

Dari penjelasan diatas, pengamat tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, hambatan apa yang dihadapi oleh LKS dketika mengimplementasikan keuangan inklusif, bagaimana efektivitas peran LKS dalam memberikan pembiayaan masyarakat ekonomi dalam mengimplementasikan keuangan inklusif terhadap masyarakat.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Keuangan Syariah**

Manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, pengorg anisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian

fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah<sup>3</sup>. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi pembiayaan<sup>4</sup>.

Aktivitas suatu perusahaan sangat ditunjang oleh modal atau dana yang dimiliki oleh para pendirinya. Dana tersebut digunakan untuk membelanjai suatu aktivitas-aktivitasnya. Dalam hubungan ini, maka perusahaan akan menghadapi sebuah penentuan metode yang tepat untuk menggunakan dana secara optimal. Dana perusahaan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari pendiri, pasar uang, maupun pasar modal. Dalam kaitannya dengan manajemen keuangan, teori umumnya selalu berbicara mengenai, cara perusahaan mendapatkan dana dari pasar modal tersebut.

Kegiatan dalam manajemen keuangan dapat mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan serta pengendalian keuangan. Orang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan disebut sebagai manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dapat dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai securities and invesment analysis (analisis bisnis, investasi dan surat-surat berharga)<sup>5</sup>.

Sistem keuangan syariah Yang perkembangannya dapat dilihat dengan dibentuknya sebuah lembaga keuangan syariah serta diterbitkannya berbagai instrument keuangan yang berbasis islam sekitar 1960-an banyak cendekiawan muslim dari Negara – Negara islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang tentang penerapan system hukum eropa kedalam instruksi keuangan, sekaligus memperkenalkan penerapannya<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> M. Fajar Hidayanto, 'Lembaga Keuangan Syariah Dan Arbitrase Muamalat Indonesia', 6 (2003).

<sup>4</sup> Dkk Susilo y. Sri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Em (Jakarts, 2000).

<sup>5</sup> Rahmat Ilyas, 'Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah', 2.1 (2017), 121–42.

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Ke 2 (Jakarta: KENCANA, 2010).



Keuangan Syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses diebentuknya Keuangan Syariah. Dibentuknya suatu bank muamalat Indonesia (BMI) yang dapat dijadikan suatu landasan awal diterapkannya ajaran islam untuk dijadikan pedoman bermuamalah<sup>7</sup>. Keuangan syariah memegang erat sebuah landasan yaitu “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, serta (menuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QA. An Nissa 4 : 58)<sup>8</sup>.

Keuangan Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang pemahamannya mengenai kinerja manajemen dapat ditentukan oleh penciptaan profit yang menunjukkan kewajiban. Selama manajemen bertindak tidak melanggar aturan syariah, kemungkinan motif-motif ekonomi dilakukan juga merupakan hal wajar untuk dilakukan.<sup>9</sup>

Pandangan syariat, uang bukanlah komoditas, melainkan hanya sebatas alat agar dapat tercapai dalam pertambahan nilai ekonomis. Hal tersebut bertentangan dengan perbankan yang berbasis bunga, dimana “uang mengembangbiakkan uang”. Yang Tidak peduli mengenai “apakah uang tersebut digunakan dalam kegiatan yang produktif atau tidak”.<sup>10</sup>

## **KEUANGAN INKLUSIF**

Inklusi keuangan merupakan indikator penting dan berorientasi kepada keadilan serta pemerataan bagi masyarakat umum. Dalam perspektif Islam tersebut, pihak pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemerataan

<sup>7</sup> Muammar Khaddafi and others, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Ilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi* (Medan: Medanatera, 2016).

<sup>8</sup> Wiroso, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, 2013).

<sup>9</sup> Niswatin, *BUKU\_KINERJA\_MANAJEMEN\_PERBANKAN\_SYARIAH.Pdf* (Yogyakarta: ZAHR publishing, 2017).

<sup>10</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Gita Danupranata* (Jakarta: Salemba empat, 2013).

ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan dan implikasinya kepada tingkat kesejahteraan.<sup>11</sup>

Umumnya strategi, Keuangan Inklusif yaitu membentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang dapat ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk serta jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan suatu produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek. Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga dapat keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya saja terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian serta lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.<sup>12</sup>

Adapun sasaran umum keuangan inklusif itu sendiri merupakan rencana dalam membangun atau memajukan perkembangan perekonomian dalam pembagian laba, pemberantasan kesengsaraan masyarakat dalam perekonomian. Pengelompokan kategori miskin yaitu: (1) Termiskin dari yang miskin; adalah penduduk miskin yang begitu tidak memiliki sumber pendapatan karena berbagai beberapa faktor faktor seperti sakit, cacat fisik sehingga tidak memiliki pendapatan, (2) Miskin berpendapatan rendah; adalah masyarakat yang mempunyai pendapatan tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk bertahan hidup. (3) Miskin bekerja; adalah masyarakat yang punya penghasilan dan cukup untuk membiayai hidupnya.

---

<sup>11</sup> Sindi Puspitasari, A Jajang W Mahri, and Suci Aprilliani Utami, 'Indeks Inklusif Keuangan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018', 4.1 (2020), 15–31.

<sup>12</sup> Lina Marlina and Biki Zulfikari Rahmat, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya', 2.1 (2018), 125–35.

(4) Bukan miskin; masyarakat yang tidak dikatakan miskin karna sangat berkecukupan dalam membiayai kehidupannya.<sup>13</sup>

Ketika dalam peningkatan keuangan inklusif, telah dilakukan dengan berbagai cara oleh pemerintah seperti sosialisasi dalam mengedukasikan masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan digital. Di zaman sekarang teknologi sudah berkembang lebuah jauh, cara-cara digital secara online melalui dilakukan. Terlebih, hasilnya jauh lebih efektif dibandingkan cara-cara konvensional.<sup>14</sup>

### **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Lembaga Keuangan Syariah pertama kali dirintis oleh umat Islam dan dibentuk dalam sebuah organisasi dengan nama OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Benghazi, Libya pada bulan Maret 1973. Organisasi tersebut pertama kali mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama IDB atau Islamic development bank yang memiliki permodalan pertama sebesar 2 M kketika membangun LKS pada saat itu. (Antonio, 2000: 20). Dibangunnya Islamic development bank telah memberikan inspirasi negara Muslim yang membangun LKS dalam bentuk bank-bank Islam di beberapa negara, seperti Saudi Arabia, Dubai, Mesir, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1992, Indonesia mulai mendirikan bank Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah BMI, mulai bermunculan lembaga-lembaga perbankan lain yang menggunakan prinsip Syariah.

LKS sebagai intermediary institution, dan merupakan kemitraan, yang tidak bersangkutan dengan pemberi dan penerima pinjaman; usaha LKS tidak bersangkutan dengan laba yang terikat, melainkan mengejar kesejahteraan di

---

<sup>13</sup> Marlina and Rahmat.

<sup>14</sup> Firda nur Asmita, *Peran Digitallisasi Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif*, 2015.



dunia dan kebahagiaan di akhirat; LKS tidak melakukan hal yang dilanggar dalam ajaran islam.<sup>15</sup>

Keberadaan UUD No. 40 Tahun 2007, sudah memberikan pengakuan tentang kegiatan usaha yang dikelola dengan prinsip syariah, serta berlandaskan nilai keadilan (al-‘adalah), kemanfaatan (al-manfa’ah) serta keseimbangan (al-tawazun), dan juga telah memberikan pengukuhan kepada seksistensi Dewan Pengawas Syariah, Berdasarkan hal tersebut serta untuk mengantisipasi perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka MUI Pusat mendirikan Dewan Syariah Nasional menampung beberapa kasus/masalah.<sup>16</sup>

### **MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebagai kesepakatan Negara-negara Asia Tenggara dalam rangka pungutan biaya pajak, terkhusus sebagai bentuk mempertahankan dari goncangan semesta. Implementasi peraturan ini sama dengan (FTA) yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nanti, namun dalam cakupan yang lebih kecil yaitu ASEAN.

Realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang sebelumnya telah disebut dalam Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation pada tahun 1992. Pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (ASEAN Summit) ke-5 di Singapura pada tahun 1992 tersebut para Kepala Negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. Kemudian dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Budi Kolistiawan, 'Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN', 8.1 (2017), 54–64.

<sup>16</sup> azhari akmal Tarigan, *Lembaga Keuangan Syariah Dan Dinamika Sosial* (Medan: FEBI UIN PRESS, 2015).

<sup>17</sup> Kolistiawan.



Mea dibentuk dengan 4 suatu kerangka yang strategis, yaitu tentang pencapaian pasar tunggal, kesatuan yang berbasis produksi, serta kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi merata serta terintegrasi dengan perekonomian global. Upaya pencapaian masing-masing sebuah kerangka yang dapat dilakukan dengan beberapa elemen-elemen, strategi yang dapat dicapai didalamnya.<sup>18</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, dimana deskriptif analisis adalah penelitian yang memberikan bayangan tentang karakter sesuatu yang sedang berlangsung ketika riset dilakukan dengan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, secara rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh (Umar,2008). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview), angket, triangulasi, dan gabungan keempatnya. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data yang tinggi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang dapat digunakan belum ada sama sekali polanya yang jelas. Oleh karena itu sering terjadi kesulitan ketika melakukan analisis. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau berupa informasi baru.

---

<sup>18</sup> R. Winantyo and others, *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015* (Jakarta: PT Ellex Media Komputindo, 2008).



Aktivitas dalam suatu analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

## **PEMBAHASAN**

Sistem keuangan sekarang, dari sisi funding, semua bisa menabung, namun dari sisi financing atau pembiayaan, tidak semua bisa masuk. Karena tidak semua orang bankable, atau memiliki collateral dan sebagainya. Jadi dari sisi funding dan financing ini terjadi ketimpangan. Ketimpangan ini menjadi semakin tinggi, sehingga bahkan menimbulkan persoalan sosial politik. Keuangan inklusif ini lahir sebagai solusi untuk bisa menjangkau kalangan masyarakat yang tidak bankable, bagaimana supaya mereka bias mendapat akses finansial. Keuangan syariah sedari awal karakternya sudah harus inklusif. Dengan layanan jasa keuangan syariah yang ada, inklusifitas ini harus terus didorong, dan kembangkan. Upayanya yaitu melalui levelnya masing-masing. Untuk kaum lemah (dhuafa), bisa lewat zakat, sehingga nantinya bisa naik kelas menjadi kelompok zakat-able (mampu berzakat). Kemudian nanti yang sudah zakatable naik ke BMT-able, atau mikro bankingable. Dan lalu berlanjut terus hingga sampai menjadi bankable.

Kalau layanan jasa keuangan inklusif syariah itu sudah berjalan menurut alur di atas, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah kemudian melakukan harmonisasi kebijakannya dengan memanfaatkan semua instrumen-instrumen keuangan yang ada di atas. Karena di Indonesia, semua layanan ekonomi dan keuangan syariah, kita punya. Dari mulai yang paling besar sampai yang paling dhuafa sekalipun, kita ada. Artinya kita punya lengkap. Persoalannya selama ini, semua layanan yang ada ini tidak ter-orquestrakan dengan baik, atau tidak ada dirijen yang bisa mengatur. Oleh karena itu harmonisasi semua layanan keuangan, mulai dari yang paling rendah sampai

yang paling tinggi inilah, yang seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh Pemerintah.

Selama ini terkesan masih banyak unsur-unsur di Pemerintah yang masih menganggap remeh atau menganggap kecil ekonomi syariah ini. Potensi zakat dianggap kecil dan diremehkan, lalu peran BMT juga dikecilkan. Padahal justru Pemerintah harus mendorong, agar semuanya bisa sinergi, mulai dari akar rumput sampai yang paling atas. Keuangan syariah bisa berperan besar dalam keuangan inklusif, ini yang seharusnya menjadi skenario nasional.

### **Upaya LKS Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif**

Ada beberapa langkah yang telah dirumuskan menjadi sebuah kebijakan dan program yang dilakukan oleh BRI Jeneponto dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, terutama dalam memberikan pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yaitu: a). dengan mengeluarkan produk dan layanan perbankan seperti tabungan dengan berbagai macam, dari mulai tabungan umum sampai dengan tabungan yang diperuntukan kepada mahasiswa dan pelajar; b). memiliki produk layanan pembiayaan mikro yang memang sejak awal fokus kepada para pengusaha mikro yang tentunya dengan kelebihan-kelebihan dan kemudahan yang dapat di akses pengusaha mikro; c). kemudahankemudahan akses tersebut diantaranya sering melakukan gerebek pasar, sosialisasi produkproduk perbankan dan melakukan open table sehingga lebih menjangkau masyarakat kecil; d). konsisten menurunkan tim marketing baik untuk produk pembiayaan dan dana serta jasa lainnya sehingga dapat diakses oleh kalangan menengah ke bawah; e). produk pembiayaan yang direncanakan: untuk usaha mikro Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR). Adapun produk yang telah ditawarkan: 1). Pembiayaan mikro untuk para pengusaha mikro, kecil dan menengah (akad murabahah), 2). Pembiayaan KPR faedah untuk kepemilikan rumah baik bersubsidi mau pun non subsidi dengan menggunakan akad (IMBT / Ijarah Muntahiya Bi Tamlik), dan akad murabahah, 3). Produk lainnya; tabungan faedah (akad wadiah);

tabungan simple (simpanan pelajar) dan mahasiswa (akad wadiah); tabungan mikro (akad wadiah); haji (akad murabahah); deposito (akad mudharabah); giro (akad wadiah). Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir adalah akad murabahah berjumlah 173 nasabah, melakukan pembiayaan < 75 juta sebanyak 2,096 nasabah, dan segmentasi < 500 juta berjumlah 10.770 nasabah.

### **Hambatan Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif**

Hambatan yang dihadapi oleh BRI Jeneponto dalam mengimplementasikan keuangan inklusif dari sisi internal bank yaitu masih terdapat kekurangan karyawan/ti dan kantor layanan yang masih terbatas secara kuantitas, sehingga belum dapat menjangkau masyarakat yang jarak lokasinya jauh. Adapun hambatan dari sisi eksternal bank yaitu untuk pembiayaan terkendala agunan sebagai second way out dikarenakan pembiayaan harus tetap aman.

Setelah itu rencana strategis kedepan yang akan dilakukan oleh BRI Jeneponto diantaranya akan menambah jumlah kantor layanan baik outlet, dan kantor cabang pembantu serta menambah jumlah karyawan sehingga dapat lebih menjangkau lapisan masyarakat kecil walaupun dipelosok-pelosok.

Sementara itu hambatan yang dihadapi oleh BNI Syariah Jeneponto dalam mengimplementasikan keuangan inklusif ini, secara internal dan eksternal tidak ada hambatan yang begitu berarti karena aturan BNI Syariah sudah baku kemudian secara eksternal pun juga masyarakat banyak yang membutuhkan tinggal bagaimana kemudian kita akan mensortir kebutuhan-kebutuhan mereka yang urgen. Pihak BNI Syariah merasa begitu khawatir karena banyak pola hidup para pengusaha di Jeneponto yang konsumtif, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak begitu sesuai dengan apa yang mereka gunakan. Sehingga BNI Syariah akan konsen dengan pengusaha-pengusaha yang benar-benar membutuhkannya.



### **Efektivitas Peran LKS dalam Pembiayaan masyarakat ekonomi ASEAN**

Dari pembahasan diatas bisa dipahami bahwa sesungguhnya ekonomi masyarakat sangat membutuhkan system kerja lembaga keuangan syariah terkhusus tentang masalah modal yang bisa dipakai dalam mengembangkan daya tarik jual beli serta dapat memajukan perusahaan dalam ekonomi nasional. LKS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya keperluan warga dalam system modal untuk dipakai dalam memajukan bisnisnya. Masalah kebutuhan modal yang di alami sebagian banyak masyarakat tersebut di respon positif oleh sebagian orang yang bersedia meminjamkan sebagian uangnya untuk modal ekonomi masrakat. Dana yang di pinjamkan kepada nasabah berasal dari uang LKS sendiri atau uang yang berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya di LKS.

Dilihat dari suatu potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya LKS mempunyai sebuah pendanaan yang cukup baik dalam melayani nasabahnya ketika dalam pengelolaan dana yang berbasis syariah. Apabila pengelolaan dana yang dilakukan oleh LKS bisa saling berkoordinasi, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan yang besar. Misalnya dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), dan dalam pengelolannya bisa lebih efektif dan berkoordinasi dengan institusi syariah lainnya tentu akan lebih bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan ketetapan program-program yang di jalankan mengarah pada sasaran yang tepat.

### **PENUTUP**

Upaya yang dilakukan LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi para pelaku ekonomi masyarakat yaitu: 1). BRI Syariah Jenepono; tabungan mahasiswa dan pelajar, pembiayaan mikro (seperti gerebek pasar, sosialisasi produk perbankan dan melakukan open table), 2). BNI Syariah Jenepono ; sosialisasi dengan warga setempat serta para pebisnis.

Hambatan yang dihadapi oleh BRI Jeneponto dalam mengimplementasikan keuangan inklusif dari sisi internal bank yaitu masih terdapat kekurangan karyawan/ti dan kantor layanan yang masih terbatas secara kuantitas, sehingga belum dapat menjangkau masyarakat yang jarak lokasinya jauh. Adapun hambatan dari sisi eksternal bank yaitu untuk pembiayaan terkendala agunan sebagai second way out dikarenakan pembiayaan harus tetap aman.

Sementara itu hambatan yang dihadapi oleh BNI Syariah Jeneponto dalam mengimplementasikan keuangan inklusif ini, secara internal dan eksternal tidak ada hambatan yang begitu berarti karena aturan BNI Syariah sudah baku kemudian secara eksternal pun juga masyarakat banyak yang membutuhkan tinggal bagaimana kemudian kita akan mensortir kebutuhan-kebutuhan mereka yang urgen. Pihak BNI Syariah merasa begitu khawatir karena banyak pola hidup para pengusaha di Jeneponto yang konsumtif, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak begitu sesuai dengan apa yang mereka gunakan. Sehingga BNI Syariah akan konsen dengan pengusaha-pengusaha yang benar-benar membutuhkannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asmita, Firda nur, *Peran Digitallisasi Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif*, 2015
- Danupranata, Gita, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Gita Danupranata* (Jakarta: Salemba empat, 2013)
- Hidayanto, M. Fajar, 'Lembaga Keuangan Syariah Dan Arbitrase Muamalat Indonesia', 6 (2003)
- Ilyas, Rahmat, 'Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah', 2.1 (2017), 121–42
- Khaddafi, Muammar, Saparuddin Siregar, Muhamad Yamin Noch, S A Nurlaila, Si Hendra Harmain, Pd Sumartono, and others, *Akuntansi*



*Syariah Meletakkan Nilai-Ilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*  
(Medan: Medanatera, 2016)

Kolistiawan, Budi, 'Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN', 8.1 (2017), 54–64

Marlina, Lina, and Biki Zulfikari Rahmat, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya', 2.1 (2018), 125–35

Nengsih, N, 'Peran Perbankang Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia, Etikonomi', 14, No. 2 (2015)

Niswatin, *BUKU\_KINERJA\_MANAJEMEN\_PERBANKAN\_SYARIAH.Pdf*  
(Yogyakarta: ZHR publishing, 2017)

Puspitasari, Sindi, A Jajang W Mahri, and Suci Aprilliani Utami, 'Indeks Inklusif Keuangan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018', 4.1 (2020), 15–31

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Ke 2* (Jakarta: KENCANA, 2010)

Susilo y. Sri, Dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Em (Jakarts, 2000)

Tarigan, azhari akmal, *Lembaga Keuangan Syariah Dan Dinamika Sosial*  
(Medan: FEBI UIN PRESS, 2015)

Winantyo, R., Saputra rahmat Dwi, Fitriani Sri, Morena Rita, Kosotali Arwin, Saichu Gunawan, and others, *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015*  
(Jakarta: PT Ellex Media Komputindo, 2008)

Wiroso, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, 2013)